

ABSTRAK

Pemerintah daerah melalui prinsip otonom, mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah berupaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk membentuk peraturan ditingkat daerah. Melalui penyerahan dan pelimpahan urusan pemerintah tersebut perlu adanya pengendalian agar pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi tidak sewenang-wenang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dan tujuan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai wewenang untuk pengawasan, pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bangkalan. Jenis penelitian adalah yuridis normatif . Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan regulasi yang terkait dengan pengawasan, dan keterangan secara langsung dari lokasi penelitian untuk menguatkan apakah regulasi terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dipahami atau dijalankan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengawasi diantaranya adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal dan pengawasan eksternal yang bertujuan agar program yang sudah direncanakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan terhindar dari pelanggaran dan penerobosan yang dilakukan oleh SKPD.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Pengawasan.

ABSTRACT

The local government through autonomous principle, have the right, authority, and duty to regulate the area and manage his own household in accordance with the legislation in force. Regional autonomy seeks to be closer to the goals of government administration to mewujudkan ideals of a just and prosperous society, local governments have the freedom to establish regulations at the regional level. Through delivery and devolution of government affairs of the need for control that local governments in running autonomy is not arbitrary.

The purpose of this study was to determine the benefits and purposes of surveillance conducted by the government that has the authority to control, the implementation of the government's oversight of the implementation of Bangkalan. This type of research is normative. The method used is the approach of legislation and regulations relating to supervision, and information directly from study sites to corroborate whether the regulations related to the implementation of the supervisory function conceived or executed.

These results indicate that the surveillance conducted by the government given the authority to oversee them is supervision carried out by the internal oversight and external supervision that aims to make the program that has been planned local government goes in accordance with the desired and avoid violations and breaches committed by SKPD.

Keywords: Local Government, Autonomy, Surveillance.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Kegunaan.....	5
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian.....	6
1.6.1 Jenis penelitian	6
1.6.2 Metode Pendekatan	7
1.6.3 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	8
1.6.4 Metode Analisa	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
2.1 Teori Pemerintah Daerah	10
2.1.1 Otonomi Daerah.....	12
2.1.2 Perangkat Daerah	13
2.1.3 Peraturan Daerah	16
2.1.4 Hubungan Eksekutif dengan Legislatif	18
2.2 Teori Pengawasan	19
2.2.1 Fungsi Pengawasan	20
2.2.2 Manfaat Pengawasan.....	21
2.3 Pengawasan DPRD	22
 BAB III PEMBAHASAN.....	 27
3.1 Bentuk-Bentuk Pengawasan Pemerintah Bangkalan	27
3.2 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangkalan.....	30
3.2.1 Pengawasan BPK	31
3.2.2 Pengawasan DPRD	34
3.2.3 Pengawasan Inspektorat	44
3.3 Peran Masyarakat Dalam Pengawasan.....	54

BAB IV Kesimpulan dan Saran	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61